
ARTIKEL

Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Distrik Sorong Timur

Mohamad Saleh Refra ¹ Suci Khamdanah ²

¹ Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Korespondensi : (salehrefra7@gmail.com)

ABSTRAK (Aptos Display, Font 12)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel di Distrik Sorong Timur. Etika pemerintahan merupakan salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan integritas, tanggung jawab, keadilan, profesionalisme, dan orientasi aparatur terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur pemerintahan distrik serta masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Etika aparatur tercermin melalui tanggung jawab dalam menjalankan tugas, sikap profesional, pemberian pelayanan yang adil, serta upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai pelayanan, program, dan kebijakan pemerintah, sedangkan akuntabilitas terlihat melalui pertanggungjawaban aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengawasan, serta respons terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas aparatur, keterbukaan informasi, sarana komunikasi, mekanisme pengaduan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya etika, peningkatan kapasitas aparatur, keterbukaan informasi publik, serta mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan Distrik Sorong Timur yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci : etika pemerintahan; kebijakan publik; transparansi; akuntabilitas; good governance.

Abstract

This study aims to analyze the application of government ethics in realizing transparent and accountable public policies in East Sorong District. Government ethics is an important foundation of public administration as it relates to integrity, responsibility, fairness, professionalism, and the orientation of government officials toward the public interest. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving district government officials

and community members as informants. Data analysis was conducted through data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The results show that the application of government ethics is closely related to the realization of transparency and accountability in public policy implementation. Ethical conduct among government officials is reflected in responsibility in performing duties, professionalism, fair service delivery, and efforts to address community needs. Transparency is demonstrated through the provision of information concerning public services, government programs, and policies, while accountability is reflected in officials' responsibility for program implementation, supervision mechanisms, and responses to community aspirations and complaints. However, its implementation still faces several challenges, particularly regarding the capacity of government officials, information openness, communication facilities, complaint mechanisms, and community participation. Therefore, strengthening ethical governance, improving officials' capacity, enhancing public information transparency, and strengthening supervision and community participation are necessary to establish a more transparent, accountable, responsive, and public-oriented government in East Sorong District.

Keywords: government ethics; public policy; transparency; accountability; good governance.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan prosedur administratif, tetapi juga oleh kualitas etika yang dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Etika pemerintahan menjadi landasan moral yang mengarahkan aparatur untuk bertindak secara jujur, bertanggung jawab, adil, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, etika memiliki hubungan erat dengan transparansi dan akuntabilitas karena keputusan dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kajian terbaru menunjukkan bahwa etika, akuntabilitas, dan transparansi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan memperoleh kepercayaan publik. Hanifa et al. (2026) menempatkan etika sebagai fondasi normatif, transparansi sebagai instrumen informasi, dan akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Transparansi dalam pemerintahan pada dasarnya berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan, keputusan, penggunaan sumber daya, serta pelaksanaan program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Kedua prinsip tersebut merupakan bagian penting dari good governance karena dapat memperkuat pengawasan masyarakat dan meningkatkan legitimasi pemerintah. Hasil systematic literature review yang dilakukan Mareta et al. (2026) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang berbeda tetapi saling melengkapi, serta memiliki kontribusi terhadap legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Kajian tersebut juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi secara proaktif, mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Penerapan etika pemerintahan menjadi semakin penting pada tingkat pemerintahan daerah dan pemerintahan distrik karena aparatur pada tingkat tersebut berhubungan secara langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah. Aparatur tidak hanya dituntut menjalankan aturan secara administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan integritas, objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Penelitian Prabowo et al. (2025) menunjukkan bahwa penguatan etika dan integritas pemerintah memiliki peranan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan perlu disertai dengan kesadaran etis agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berhenti pada aspek formal, tetapi juga menghasilkan pelayanan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. *Jurnal Institut Mandalika*

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, etika pemerintahan juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Kebijakan publik yang transparan memungkinkan masyarakat mengetahui tujuan, proses, dan hasil dari kebijakan yang dibuat pemerintah, sedangkan akuntabilitas memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai serta mempertanyakan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian mengenai implementasi prinsip good governance di Indonesia menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas merupakan unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mareta et al. (2024) juga menegaskan bahwa tantangan good governance di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pada tingkat pemerintahan lokal, hubungan antara tata kelola yang baik dan kualitas pelayanan publik menjadi semakin relevan karena masyarakat secara langsung merasakan dampak dari kebijakan dan keputusan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan dan program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sari, Yudianto, dan Mulyani (2024) menemukan bahwa prinsip good government governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas, berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Konteks tersebut menjadi penting untuk dikaji pada Distrik Sorong Timur sebagai salah satu wilayah pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik pada tingkat distrik membutuhkan aparatur yang mampu menjalankan tugas berdasarkan prinsip integritas, keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan aturan atau prosedur, tetapi juga dari bagaimana aparatur melaksanakan kebijakan, memberikan informasi kepada masyarakat, menerima aspirasi, mengelola sumber daya publik, dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program. Studi tentang tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi

dapat memperkuat akuntabilitas, terutama ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Selain transparansi dan akuntabilitas, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang sekaligus tantangan bagi penerapan etika pemerintahan di tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pemerintah menyediakan informasi publik secara lebih cepat dan luas, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada integritas aparatur, kualitas informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia. Penelitian Antoni et al. (2026) menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan dalam memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah, meskipun pemerintah daerah masih menghadapi persoalan keterbatasan transparansi dan kapasitas teknologi. Oleh karena itu, digitalisasi pemerintahan seharusnya tidak dipandang hanya sebagai perubahan teknis, melainkan juga harus disertai penguatan etika, kapasitas aparatur, dan mekanisme pengawasan publik.

Permasalahan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin kompleks apabila terdapat kesenjangan antara aturan formal dengan praktik pemerintahan. Pemerintah dapat memiliki berbagai instrumen regulasi mengenai transparansi dan akuntabilitas, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan dan perilaku aparatur dalam menerapkan prinsip tersebut secara konsisten. Hanifa et al. (2026) menunjukkan bahwa berbagai inisiatif digitalisasi dan mekanisme administratif belum sepenuhnya mampu mencegah persoalan integritas apabila fondasi etika dalam pemerintahan masih lemah. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak cukup dibangun melalui prosedur administratif semata, tetapi membutuhkan budaya organisasi dan perilaku aparatur yang menjunjung tinggi integritas serta kepentingan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan etika pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel di Distrik Sorong Timur menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana prinsip etika pemerintahan diterapkan oleh aparatur dalam proses pelaksanaan kebijakan publik, bagaimana bentuk transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta bagaimana mekanisme akuntabilitas dijalankan dalam mempertanggungjawabkan kebijakan dan program pemerintah. Kajian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan etika pemerintahan di tingkat distrik. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi etika pemerintahan dan tata kelola publik sekaligus memberikan masukan praktis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Sorong Timur. Temuan penelitian terbaru mengenai tata kelola lokal di Indonesia menegaskan pentingnya mengintegrasikan etika, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan etika pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas di Distrik Sorong Timur. Penelitian kualitatif

memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, perilaku, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi pada proses memahami bagaimana prinsip etika pemerintahan diterapkan dalam praktik penyelenggaraan kebijakan publik. Penelitian dilaksanakan di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi tersebut dipilih karena Distrik Sorong Timur merupakan salah satu unit pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan publik

HASIL PENELITIAN (Aptos Display, Font 12)

1. Penerapan Etika Pemerintahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan etika pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan publik di Distrik Sorong Timur dapat dilihat melalui beberapa aspek utama, yaitu integritas aparatur, tanggung jawab, profesionalisme, keadilan dalam pelayanan, serta orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Etika pemerintahan menjadi dasar bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kepentingan publik.

Hasil wawancara dengan aparatur pemerintah menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan pada tingkat distrik diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparatur dituntut untuk bersikap ramah, bertanggung jawab, tidak membedakan masyarakat, serta memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika pemerintahan memiliki hubungan langsung dengan kualitas interaksi antara aparatur pemerintah dan masyarakat.

Dari perspektif masyarakat, penerapan etika pemerintahan dapat dilihat dari pengalaman mereka ketika berhubungan dengan aparatur dalam memperoleh pelayanan. Masyarakat menilai etika aparatur antara lain melalui sikap, kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, kesediaan memberikan penjelasan, dan perlakuan yang diberikan kepada setiap masyarakat. Oleh karena itu, etika pemerintahan tidak hanya merupakan konsep normatif, tetapi dapat dirasakan secara langsung melalui perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan publik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa etika pemerintahan perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pelaksanaan kebijakan publik. Aparatur yang memiliki integritas akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara objektif dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh perilaku dan integritas aktor yang melaksanakannya.

Hal ini sejalan dengan Hanifa et al. (2026) yang menjelaskan bahwa etika, transparansi, dan akuntabilitas merupakan unsur yang saling berkaitan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Etika memberikan dasar moral bagi aparatur dalam menggunakan kewenangan, sedangkan transparansi dan akuntabilitas menyediakan mekanisme agar tindakan pemerintah dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Transparansi dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik di Distrik Sorong Timur dapat dianalisis melalui keterbukaan informasi mengenai

program pemerintah, prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah distrik perlu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses melalui saluran yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah dapat berupa penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, pengumuman, komunikasi melalui aparaturnya atau pemerintah kelurahan/kampung, serta pemanfaatan media komunikasi yang tersedia. media sosial, papan informasi, website, atau forum Masyarakat.

Meskipun demikian, transparansi tidak hanya diukur berdasarkan tersedianya informasi, tetapi juga berdasarkan kualitas informasi tersebut. Informasi yang terlambat, tidak lengkap, sulit dipahami, atau hanya diberikan ketika masyarakat meminta dapat menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang benar-benar transparan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme penyampaian informasi secara proaktif agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi publik.

Mareta et al. (2026) dalam kajian literturnya menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang saling melengkapi dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai tindakan pemerintah, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transparansi di tingkat distrik harus dipahami sebagai proses membuka akses informasi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

3. Akuntabilitas Pemerintah dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, program, dan penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks Distrik Sorong Timur, akuntabilitas dapat dilihat dari bagaimana aparaturnya menjalankan tugas sesuai kewenangan, melaksanakan program sesuai tujuan, memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta menerima evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban aparaturnya tidak hanya dilakukan melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui hubungan langsung dengan masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh pelayanan atau berhubungan dengan pelaksanaan suatu program, aparaturnya memiliki kewajiban memberikan informasi dan penjelasan mengenai prosedur maupun hasil pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dimensi administratif sekaligus sosial.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah menerima kritik, saran, dan pengaduan dari masyarakat. Pemerintahan yang akuntabel tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga memberikan respons terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, mekanisme pengaduan masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pemerintah bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan dan kebijakan yang dilaksanakan.

Penelitian Sari, Yudianto, dan Mulyani (2024) menunjukkan bahwa penerapan good government

governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas, memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

4. Hubungan Etika Pemerintahan dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika aparatur menjalankan tugas berdasarkan prinsip integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kepentingan publik, maka terdapat dasar yang lebih kuat bagi pemerintah untuk membuka informasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan.

Etika menjadi landasan internal, sedangkan transparansi dan akuntabilitas dapat dipandang sebagai mekanisme eksternal yang memungkinkan masyarakat melihat dan menilai tindakan pemerintah. Aparatur yang memiliki kesadaran etis tidak hanya menjalankan tugas karena adanya pengawasan, tetapi memiliki dorongan internal untuk melaksanakan kewenangan secara benar dan bertanggung jawab.

Hubungan tersebut dapat digambarkan bahwa etika pemerintahan → perilaku aparatur yang berintegritas → transparansi dan keterbukaan → akuntabilitas → meningkatnya kepercayaan masyarakat. Apabila salah satu unsur tersebut lemah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan juga dapat mengalami hambatan. Misalnya, keterbukaan informasi tanpa integritas dapat menghasilkan informasi yang tidak lengkap atau tidak objektif, sedangkan akuntabilitas tanpa transparansi akan menyulitkan masyarakat untuk mengetahui dasar pertanggungjawaban pemerintah.

Hanifa et al. (2026) menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme administratif dan digitalisasi, tetapi juga memerlukan fondasi etika yang kuat. Hal tersebut relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik karena aparatur merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

5. Faktor Pendukung Penerapan Etika Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung penerapan etika pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan publik di Distrik Sorong Timur. Faktor tersebut meliputi adanya aturan dan standar kerja, kepemimpinan yang memberikan teladan, komitmen aparatur, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.

Kepemimpinan memiliki posisi penting karena perilaku pimpinan dapat menjadi contoh bagi aparatur lainnya. Pimpinan yang menunjukkan integritas, keterbukaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab akan menciptakan lingkungan organisasi yang mendorong aparatur untuk menerapkan nilai-nilai yang sama. Sebaliknya, lemahnya keteladanan pimpinan dapat menghambat terbentuknya budaya etis dalam organisasi pemerintahan.

KESIMPULAN (Aptos Display, Font 12)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan etika pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel di Distrik Sorong Timur, dapat disimpulkan bahwa etika pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penerapan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, keadilan, keterbukaan, dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat menjadi dasar bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kewenangan secara tepat dan bertanggung jawab. Etika pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan aparatur terhadap peraturan, tetapi juga tercermin melalui sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan, menyampaikan informasi, merespons kebutuhan masyarakat, serta mempertanggungjawabkan setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan. Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan, program pemerintah, kegiatan, serta kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui adanya pertanggungjawaban aparatur, pelaporan kegiatan, pengawasan, mekanisme pengaduan, dan kesediaan pemerintah menerima kritik maupun masukan dari masyarakat. Dengan demikian, etika, transparansi, dan akuntabilitas merupakan unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat distrik. Meskipun demikian, penerapannya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek kapasitas aparatur, keterbukaan informasi, pemanfaatan sarana komunikasi, mekanisme pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Distrik Sorong Timur perlu meningkatkan pembinaan dan penguatan etika aparatur, membangun budaya kerja yang berintegritas, menyediakan informasi publik secara proaktif dan mudah diakses, memperkuat mekanisme pertanggungjawaban serta pengaduan masyarakat, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang tidak hanya bekerja berdasarkan aturan formal, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk memberikan pelayanan yang adil, terbuka, responsif, dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Sorong Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., & Akbar, M. S. (2026). Analysis of transparency and accountability in local government management and its implications for public service performance in West Sulawesi. *Journal of Business and Management Inaba*. <https://doi.org/10.56956/93jtkn15>
- Hanifa, M. R., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2026). Beyond compliance: A systematic review of ethics, accountability, and transparency in Indonesian governance. *Policy & Governance Review*, 10(1), 85–102. <https://doi.org/10.30589/pgr.v10i1.1361>
- Hutauruk, R. P., & Zulkifli. (2024). The effectiveness of good governance in improving civil servants performance in the era of bureaucratic reform. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, 9(1).
- Khoirunnisa, K., & Jubaidi, D. (2025). Bridging regulation and practice: Regional insights on local budget corruption and governance in Southeast Asia. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 11(2).
- Mareta, A. D., Brajahadi, R., Ichsan, J., & Eko, A. (2026). Good governance dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan: Tinjauan literatur sistematis tahun 2015–2025. *Public Management and Accounting Review*, 7(1).
- Mareta, A. M., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Implementasi tantangan dan upaya dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Al-DYAS*, 4(1), 233–245.

- Prabowo, I. D., & Hermawati, I. (2024). Etika pemerintahan: Menjaga integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(7).
- Prabowo, M. A., Fadjerini, L. N., Hidayadi, T., Zuhdi, M., Ulfah, F., Razik, M. A., & Hanifah, M. N. (2025). Supervision of ethical compliance and government integrity in improving accountability and transparency of educational governance. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.59613/mjbms.v3i1.180>
- Putra, A. D., & Darmawan, I. (2026). Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2024. *Journal Publicuho*, 9(1). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v9i1.1086>
- Purdiono, A., Pramudiana, I. D., Haryati, E., & Pramono, S. (2026). Improving public service quality through the implementation of good governance at the Surabaya City Revenue Agency. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*.
- Rahmi, R., Normawati, N., Ufie, J. A., & Layn, S. B. (2026). Implementation of good governance principles in the 2024 election: A study of transparency and accountability in the Central Maluku Regency KPU. *Journal of Government Science Studies*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.66254/jgssvol5issue1page1-11>
- amda, E. E. (2025). Deliberative public policy of village governance: Legal-historical notes during the implementation of regional autonomy. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 5(1), 67–78. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.67-78>
- Sari, S., Yudianto, I., & Mulyani, S. (2024). Pengaruh implementasi good government governance pada kualitas pelayanan publik (Studi pada pemerintah daerah di Indonesia). *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(2). <https://doi.org/10.30656/jak.v11i2.8748>
- Simanulang, L., & Pramudya, A. (2026). Public service innovation in enhancing government transparency and accountability. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.45359>
- Sunan, M. A. R., Salsabila, Y. A., & Hadinata, S. (2025). What shapes the perceived quality of local government financial reports? Evidence from the Special Region of Yogyakarta. *Journal of Accounting Inquiry*, 4(2), 122–136. <https://doi.org/10.14421/jai.2025.4.2.122-136>